
TINJAUAN KRITIS POPULISME DI INDONESIA ANTARA GAGASAN ATAU CARA BARU SIRKULASI ELIT?

Mustabsyirotul Ummah Mustofa¹

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
mustabsyirotul.ummah@unpad.ac.id

ABSTRAK

Perubahan politik Indonesia bergerak ke arah penguatan aktor dengan munculnya pemimpin-pemimpin populis yang diharapkan mampu membawa perubahan kehidupan masyarakat. Kesadaran mengenai kekuasaan merupakan hal inheren dalam diri manusia ditunjang dengan adanya kesempatan berkuasa melalui Pemilihan Umum sebagai bagian dari prasyarat demokrasi, menjadi pintu masuk bagi para aktor populis untuk bisa berada dalam sistem. Tulisan ini melihat bagaimana dan seberapa jauh kemungkinan populisme menjadi sebuah gagasan untuk menjawab kebutuhan mencapai negara kesejahteraan ataukah populisme hanya sebatas cara baru meraih kekuasaan politik yang artinya sebuah alasan terjadinya sirkulasi elit semata.

Kata kunci : Populisme, Demokrasi, , Sirkulasi Elit

ABSTRACT

The Changing in Indonesian political moving towards strengthening the actor with the emergence of populist leaders who are expected to bring a change in society. Awareness of power is inherent in man and supported by the opportunity to extant the power through democratic elections, as an entrance for the populist to be able in the system. This article discusses how and to what extent the possibility of populism become the ideology to fulfill the needs of welfare state or it is only a new way to reach political power which means just a reason for an elite sirculation mechanism.

Keywords: Populism, Democracy, Elite Sirculation

¹Penulis adalah Dosen di Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.
mustabsyirotul.ummah@unpad.ac.id

PENDAHULUAN

Tulisan ini didasari dari hasil penelitian Demos pada tahun 2009, tulisan Burhanuddin Muhtadi tentang populisme² dan yang terbaru, hasil riset *Power Welfare and Democracy (PWD)* UGM tentang ‘Demokrasi di Indonesia : Antara Patronase dan Populisme’. Temuan menariknya dari tulisan-tulisan di atas adalah bahwa hubungan patron-klien di Indonesia tidak lagi menjadi satu-satunya alternatif hubungan politik dan Indonesia saat ini kecenderungan mengarah pada populisme (Savirani, Tornquist, & Stoke, 2014). Namun ada indikasi bahwa populisme akan mengarah pada persoalan baru, meminjam istilah Burhanuddin yakni sebagai, ‘racun demokrasi’ atau menurut Demos akan membawa ‘demokrasi ke bibir jurang’.

Seperti di ketahui, wacana populisme di Indonesia semakin segar dibicarakan pasca kemunculan Jokowi di media dengan gaya kepemimpinannya di Solo, Jawa Tengah yang berhasil membawanya hingga kursi Presiden periode 2014-2019. Selain itu ditambah dengan adanya kecenderungan bahwa politik saat ini berbasis pada individual atau “*figur-based politics*” yang menduduki posisi publik seperti pemimpin daerah (provinsi dan kabupaten/kota) (Savirani, Tornquist, & Stoke, 2014). Douglas Ramage, pengamat politik *Bower Group Asia* menganalisis bahwa popularitas adalah logika yang menjadi faktor pendorong politik Indonesia saat ini serta persepsi akan seorang kandidat yang bersih, transparan dan otentik adalah hal-hal yang mendorong popularitas, ditambah perubahan tersebut paling terlihat dan terasa di Pulau Jawa, jantung politik dan ekonomi Indonesia. Sejumlah wajah baru mendefinisikan ulang arti dan makna menjadi pejabat publik³. Kemunculan pemimpin-pemimpin daerah dan para politisi yang memiliki karakter populis, yang disebut

sebagai generasi pembaharu politik oleh *Wall Street Journal Indonesia*⁴, semakin membuat bahasan populisme di Indonesia menarik untuk dikaji.

Tulisan ini menggunakan metode kajian pustaka dengan memfokuskan pada bahasan tentang populisme dan bagaimana pemimpin populis diposisikan sebagai aktor. Kajian ini sekaligus melihat bagaimana dan seberapa jauh antara kemungkinan populisme menjadi sebuah gagasan untuk menjawab kebutuhan mencapai negara kesejahteraan dan sebagai cara memecahkan kebuntuan pembangunan politik di Indonesia atau sebenarnya kemunculan populisme hanya sebagai tren untuk mekanisme sirkulasi elit baru dalam konteks yang lebih demokratis.

Berbicara demokrasi Indonesia maka akan diawali dari runtuhnya rezim otoritarian Orde Baru pada tahun 1998 yang menandai demokratisasi⁵ dan mulainya perubahan peta politik Indonesia, dan dapat dibaca sebagai titik awal pelemahan peran negara di satu sisi dan

⁴Wall Street Journal (WSJ) Indonesia menyebutkan munculnya sejumlah pemimpin yang dapat dipercaya membawa perubahan dan perbedaan di panggung politik Indonesia, yakni Joko Widodo (Presiden Indonesia 2014-2019), Ridwan Kamil (Walikota Bandung 2013-2018), Anies Baswedan (Bakal Calon Presiden dari Partai Demokrat, Rektor Universitas Paramadina, Penggagas Gerakan Indonesia Mengajar), Ganjar Pranowo (Politisi PDI-P, Gubernur Jawa Tengah), Sri Mulyani (Direktur Pelaksana World Bank), Teten Masduki (Aktivis dan Pendiri Indonesian Corruption Watch), Bima Arya (Walikota Bogor), Kholid Arif (Bupati Wonosobo), Yusril Ihza Mahendra (Politikus dan Pakar Hukum), Budiman Sudjatmiko (Anggota DPR, Fraksi PDI-P), dan Yenny Wahid (Pendiri Wahid Institute) (*available at* : http://graphics.wsj.com/lists/INDOGEN_INA, diakses 26 Desember 2014).

Beberapa contoh kepala daerah lain misalnya Walikota Surabaya, Tri Rismaharini yang berani membubarkan lokalisasi Dolly serta Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang dikenal dengan Ahok sebagai gubernur dari etnis Tionghoa yang berhasil menggebrak pemerintahan DKI Jakarta (*Available at* : <http://www.dw.de/tentang-generasi-kepemimpinan-baru/a-17766679>, diakses 26 Desember 2014)

⁵Definisi tentang demokratisasi cenderung telah disepakati yang mengacu pada karya Samuel Huntington yang memberikan kerangka substantif demokratisasi, yaitu (1) berakhirnya sebuah rezim otoriter, (2) adanya proses transisi yang memberikan kesempatan pada partisipasi publik dan liberalisasi politik menuju pembentukan rezim demokratis, dan (3) adanya konsolidasi rezim demokratis. Secara terminologis, demokratisasi ialah proses perubahan dari rezim nondemokratis menjadi rezim demokratis (Kurniawan, Lutfi J. dan Puspitasari, Hesti, 2008).

²Burhanudin Muhtadi, 2013. “*Populisme; Madu Atau Racun Bagi Demokrasi?*”. Majalah Indonesia 2014, No. 3, Vol. 1, 2013. Hal 94 (Online)

³<http://indo.wsj.com/posts/2013/10/08/wajah-baru-pemimpin-indonesia>, diakses pada 26 Desember 2014

menguatnya kontrol masyarakat pada sisi yang lain (Haryanto, 2009). Ketegangan politik, kegagalan representasi dan hilangnya kepercayaan publik merupakan hal yang tidak terelakkan sebagai faktor munculnya populisme dan lahirnya pemimpin-pemimpin populis. Hal ini karena manusia sebagai aktor politik memiliki kesempatan menjadi agensi yang merubah keadaan dengan tangan dan perbuatannya sebagai bagian dari kesadarannya atas tanggungjawab yang dimilikinya sebagai manusia⁶. Sehingga memunculkan agen-agen atau dalam bahasa lain di sebut aktor alternatif dengan karakter populis merupakan sintesis dari ketegangan politik (Samadhi & Warouw 2009, Deiwiks 2009, Pratikno & Lay 2013, Savirani, Tornquist, & Stoke, 2014)

Kemunculan aktor-aktor alternatif dengan karakter populisme ini hadir dalam struktur negara baik itu eksekutif maupun legislatif melalui mekanisme pemilu yang terbuka dengan prinsip demokrasi kebebasan politik individu yang berhak untuk memilih maupun dipilih. Dalam kerangka politik demokratis, kebanyakan aktor mulai menerima demokrasi sebagai 'satu-satunya aturan main' (*the only game in town*)⁷ dan oleh karenanya keinginan menjadi pembaharu dari stagnansi persoalan publik hanya bisa dilakukan oleh pemimpin populis yang memiliki kekuasaan. Hal ini sepaham dengan apa yang Giddens sebut sebagai agensi, bahwa individu dengan kesadarannya bisa bertindak mengintervensi dunia, atau menjaga diri dari intervensi semacam itu dengan dampak memengaruhi suatu proses atau keadaan khusus dari urusan-urusan (Giddens, 2010). Agensi merupakan sebuah kategori subjek politik khusus yang menempati tempat khusus dalam kehidupan dan masyarakat politik yang disebut dengan

aktor. Aktor merupakan sebutan untuk subjek individu-individu atau perorangan bertindak dengan segala otonomi dan rasionalitas dimiliki (Trijono, 2011). Artinya bahwa aktor alternatif dengan karakter populis berkecenderungan memposisikan dirinya sebagai agensi yang merasa memiliki tanggungjawab untuk menjawab masalah-masalah publik yang tidak terselesaikan oleh aktor-aktor utama (dibaca: menggantikan).

Elit dan Demokrasi

Terdapat sebuah kalimat yang menarik untuk ditelusuri yakni, "demokrasi dibajak elit". Pertanyaannya adalah apakah demokrasi benar-benar dibajak oleh elit? Ataukah demokrasi memang kompatibel untuk menumbuhkembangkan elitisme?

Dalam arti secara harfiah, demokrasi dapat diutarakan sebagai *demos* yang berarti rakyat serta *kratos* yang berarti kekuasaan, sehingga demokrasi dirasa sebagai kekuasaan rakyat. Menurut seorang negarawan Athena yang hidup pada tahun 430-an SM, Pericles, demokrasi mengandung beberapa kriteria penting: (1) pemerintahan oleh rakyat yang dibangun dari dukungan atau partisipasi rakyat yang mayoritas secara langsung; (2) kesamaan warga Negara di depan hukum; penghargaan terhadap wilayah privat (pemenuhan Hak Asasi Manusia –dalam konteks kekinian-) untuk memenuhi dan mengekspresikan kebebasan individual; serta pluralisme. Yang menarik adalah bahwa penafsiran ini merupakan makna peyoratif dari oligarki di Athena. Jika saat ini demokrasi masih dipahami sebagai kekuasaan oleh rakyat maka sebenarnya yang terjadi bukan rakyat yang memilih pemerintahannya tetapi lebih pada membuat pilihan yang memungkinkan rakyat memiliki derajat mengawasi pemerintahan yang telah dipilihnya (Kingsbury, 2007). Pemahaman ini menimbulkan setidaknya pertanyaan apakah yang 'dipilih' untuk memerintah atas nama kekuasaan rakyat adalah benar dipilih oleh rakyat dalam kebebasannya

⁶ Seperti diungkap oleh Arnold Toynbee berikut ini, "as human beings, we are endowed with freedom of choice, and we cannot shuffle off our responsibility upon the shoulders of God or nature. We must shoulder it ourselves. It is our responsibility (Alfian, 2009).

⁷Samadhi, Willi Purna & Warrouw, Nicholas. (2009). *Demokrasi di Atas Pasir*. Jakarta : PCD Press dan Demos. Hlm 56.

ataukah pemilihan hanya bagian dari oligarki atau elit politik. Seperti yang diutarakan oleh Dahl, bahwasanya demokrasi adalah kompetisi oligarki yakni memilih pemerintahan rakyat adalah memilih antara pemimpin politik atau elit politik (Kingsbury, 2007).

Terminologi elit sebagaimana diungkapkan oleh Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, Suzanne Keller dan lain-lain pemikir yang tergolong dalam 'elite theorists', memang menunjukkan pada kelompok atau golongan yang ada di suatu masyarakat yang memiliki keunggulan atau superioritas apabila dibandingkan dengan kelompok atau golongan yang lainnya. (Haryanto, 2005). Pareto membagi kelas elit menjadi *governing elite* dan *non governing elite*. *Governing Elite* (kelas yang memerintah) terdiri dari individu-individu yang secara langsung atau tidak langsung memainkan peran besar dalam pemerintahan artinya elit ini merupakan elit yang berperan dalam penentu kebijakan. Sedangkan *non governing elite* lebih pada elit yang memiliki sumber kekuasaan namun tidak ada dalam kapasitas sebagai elit penentu atau pembuat kebijakan. Sementara Mosca mendudukan menjadi dua kelas, yakni *The Rulling Class*, yang jumlahnya lebih sedikit, melaksanakan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati berbagai keistimewaan yang diberikan oleh kekuasaan; dan *The Ruled Class*, yang jumlahnya lebih banyak, diperintah dan dikendalikan oleh kelas yang pertama. Bottomore meringkas skema konseptual yang diurai oleh Pareto dan Mosca dalam gagasan umum sebagai berikut : (1) Dalam setiap masyarakat, ada suatu minoritas yang menguasai anggota masyarakat lain yang mayoritas; (2) Minoritas ini disebut kelas politik atau elit yang memerintah. Terdiri dari mereka yang menduduki jabatan-jabatan komando politik dan secara lebih tersamar, yang secara langsung dapat memengaruhi keputusan politik; (3) Minoritas yang memerintah ini mengalami perubahan dalam keanggotannya selama

jangka waktu tertentu (*Sirkulasi Elit : Promotion – Demotion*); (4) Perubahan keanggotaan terjadi akibat masuknya anggota baru dari lapisan masyarakat yang lebih rendah, kadang-kadang akibat bergabungnya kelompok sosial baru, dan sesekali juga akibat adanya pergantian menyeluruh atas elit yang mapan oleh suatu elit tandingan seperti halnya revolusi (Alfian, 2009 : 29-30)

Golongan elit memang merupakan golongan minoritas, meskipun tidak selalu secara eksplisit, yang mana mereka memiliki keunggulan diantara masyarakat lainnya yakni: (a) posisi yang mereka duduki – ini merupakan hal yang paling penting atau merupakan yang sentral; (b) sifat-sifat yang menjadi dasar pemilihan terhadap mereka – memiliki atau tampaknya memiliki semacam keunggulan, baik itu berupa kebijaksanaan, keberanian, intelegensi, turunan ataupun dalam bentuk keahlian dalam pengetahuan dan keterampilan; (c) tanggungjawab sosial mereka – mempunyai tanggungjawab yang lebih besar dalam hal ini daripada penduduk lainnya; dan (d) imbalan mereka – memperoleh bagian yang lebih banyak dalam hal-hal untuk kebaikan hidup (Keller, 1984). Keunggulan yang dimiliki oleh elit inilah yang memicu ketidaksetaraan didalam masyarakat, padahal demokrasi mengatakan adanya kesetaraan diantara masyarakat itu sendiri. Sehingga apakah untuk mencapai kesetaraan masyarakat, apakah elit yang harus dihilangkan atau demokrasi yang harus ditinjau kembali?

Pertentangan antara gagasan tentang elit dan gagasan tentang demokrasi bisa diungkapkan dalam dua bentuk : *pertama*, keanggotaan dalam teori-teori tentang elit mengenai ketidaksetaraan kualitas individu berlawanan dengan gagasan politik demokratis yang fundamental, yang lebih cenderung untuk menekankan kesetaraan mendasar pada individu-individu; dan *kedua*, gagasan tentang minoritas yang memerintah adalah berlawanan dengan teori demokrasi tentang pemerintahan

mayoritas. Namun gagasan yang berlawanan ini tidak terlihat sangat kontradiktif dan konfliktual. Bila demokrasi dipandang sebagai terdiri dari lebih daripada satu sistem politik, demokrasi tetap berkesesuaian dengan teori elit; karena gagasan tentang kesetaraan yang demokrasi sebagai suatu bentuk masyarakat mungkin dipandang sebagai implikasinya dapat dengan mudah direinterpretasikan sebagai kesetaraan kesempatan. Demokrasi kemudian akan diperlakukan sebagai suatu tipe masyarakat dimana elit-elit – ekonomi dan kultural juga politis – secara prinsip adalah ‘terbuka’; dan dalam kenyataan direkrut dari lapisan-lapisan sosial yang berbeda berdasarkan keunggulan individu. Konsepsi posisi elit dalam demokrasi secara aktual disiratkan oleh teori pergantian elit (sirkulasi elit), dan secara eksplisit dinyatakan dalam tulisan-tulisan Mosca (Bottomore, 2006).

Kajian Populisme dan Kepemimpinan Populis

Seperti kajian kontemporer lainnya, populisme hadir sebagai sebuah konsep yang dapat diisi oleh berbagai ide. Kajian mengenai populisme sudah lebih dulu dan banyak dibahas yang berawal dari pergerakan petani di Rusia dan Amerika Serikat pada akhir abad ke 19, dilanjutkan kemunculan populisme di Amerika Latin pada pertengahan abad ke 20, hingga saat ini populisme bangkit di negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Amerika Latin (Deiwiks 2009, Girdon and Bonikowski 2013). Bahasan mengenai populisme umumnya didefinisikan berdasarkan kajian ekonomi, sosial dan politik dan dianalisis dari berbagai perspektif dan pendekatan teori termasuk diantaranya strukturalisme, pots-strukturalism, teori modernisasi, teori *social movement*, teori partai politik, psikologi politik, ekonomi politik dan teori demokrasi. (Girdon and Bonikowski, 2013). Oleh karenanya dapat ditemui beragam definisi dan pemaknaan terkait dengan populism.

Secara beragam, populisme didefinisikan oleh para ilmuwan berdasarkan apa yang terjadi secara empiris yang dianalisisnya masing-masing namun hal ini dianggap masih belum bisa menjawab secara eksplisit apa definisi sebenarnya dari populisme dan justru menjadi tantangan tersendiri untuk memahami populisme (Deiwiks, 2009). Untuk menjawab kebingungan definisi mengenai populisme, Girdon dan Bonikowski melakukan *literatur review* dan menarik kesimpulan terkait definisi dari populisme melalui pendekatan politik dan sosiologi yang meliputi ; populisme sebagai gagasan, populisme sebagai sebuah *discursive stlye* dan populisme sebagai bentuk mobilisasi politik (Laclau 2005, Girdon and Bonikowski 2013).

Laclau juga menyimpulkan populisme dari hasil analisisnya yakni sebagai sebuah *political logic* yakni sebuah konsekuensi dari kondisi politik yang terjadi pada masyarakat; *namings and effects* yakni pendefinisian kata populisme ataupun populis akan memberikan konsekuensi khusus untuk menentukan kategori tujuan yakni utamanya berorientasi pada rakyat atau ‘*the people*’, dan *particular demand* yakni sebagai sebuah permintaan sosial (*demand, request*) dari ketidakpuasan masyarakat dengan kondisinya sosial ekonominya (Laclau, 2005). Dari analisis definisi yang ditawarkan oleh Laclau sebenarnya ia sekaligus menyebutkan indikator faktor berkembangnya populisme. Populisme akan kemungkinan besar berkembang dalam kondisi tatanan sosial yang sudah rusak dimana publik kehilangan kepercayaannya terhadap sistem politik karena kegagalan partai politik menjadi saluran representasi yang efektif sehingga memunculkan apatisisme politik masyarakat. Selain itu adanya pengaruh dari perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan politik baik di dalam maupun di luar negeri yang akan mempengaruhi gejolak masyarakat untuk menuntut perubahan. Sementara dalam riset PWD, populisme dipahami sebagai gaya politik Manichean yang mencakup tiga

dimensi pokok yakni; *Pertama*, populisme mengacu pada “rakyat”. Para pemimpin populis umumnya mengaku mewakili dan bertindak atas nama “rakyat” dalam pengertian orang kebanyakan. *Kedua*, populisme juga berkaitan dengan gagasan menciptakan dan memperkuat hubungan antara para pemimpin populis dan rakyat yang bersifat langsung. *Ketiga*, gaya politik ini secara pekat mengandung sentiment-sentimen anti kemapanan dan anti elit (Savirani, Tornquist, & Stoke, 2014). Pemahaman populisme seperti ini mengandung dua implikasi yang saling berhimpit, antara sebuah gerakan melawan dominasi oligarkis dengan mobilisasi massa dan kelompok terpinggirkan atau gagasan politik tentang cara pandang pembangunan yang berorientasi pada rakyat. Perbedaan ini sangat tipis dan perlu melihat kajian populisme secara induktif agar populisme tidak dibaca secara sinis, hanya dilihat tentang kepemimpinan dan pemimpin namun juga harus dilihat dari posisi dan sudut pandang masyarakatnya⁸

Kajian populisme dalam konteks ke-Indonesia-an sendiri tidak bisa dilepas begitu saja dari perjalanan sejarah transisi menuju demokrasi yang mana sepanjang perjalanannya menemui beragam hambatan dan tantangan dalam mendemokrasikan Indonesia⁹. Beragam kondisi sosial ekonomi mewarnai kehidupan masyarakat namun dalam kecenderungan

ketidakpuasan dimana korupsi merajalela dan penegakkan hukum yang tidak adil, selain itu masyarakat tidak merasakan kehadiran pemerintahan yang berfungsi dengan baik untuk menyelesaikan semua persoalan yang akhirnya hanya menyisakan ketegangan politik yang dari waktu ke waktu terus berdinamisasi sementara isu-isu publik tidak terurus (Savirani, Tornquist, & Stoke, 2014). Dari perjalanan sejarah ini, populisme di Indonesia merujuk pada analisis Laclau sebagai *political logic* dan *particular demand*, sebagai antitesis dari keadaan masyarakat saat ini, dengan gaya kepemimpinan dan cara bertindak ‘atas nama rakyat’ dan ‘anti kemapanan’

Populis sebagai subjek politik dengan gagasan populisme memiliki identitas yang membedakan dirinya dengan aktor politik lainnya. Hubungan subjek politik dengan struktur kekuasaan dalam menjadi penting untuk dielaborasi. Pembentukan agensi-agensi politik sebagai subjek kekuasaan pada dasarnya merupakan bagian penting dari persoalan pembentukan identitas politik, khususnya dalam pembentukan atau konstruksi politik tentang ‘saya *I*’ dan ‘orang lain *the other*’ sebagai subjek politik, atau konstruksi tentang ‘saya *I*’ mewakili ‘kita *We*’ dihadapan ‘mereka *they*’. Konstruksi tentang ‘*I – O*’ atau ‘*I = We – They*’, ini saling mendeterminasi dan secara konstitutif membentuk identitas politik sebagai subjek kekuasaan atau agensi politik (Triyono, 2011). Hal mengenai pembentukan identitas politik agensi ini yang kemudian serupa dengan pelekatan identitas pemimpin populis yang selalu mengacu ‘atas nama rakyat’ yang membedakan kedudukan antara ‘Kita Vs Mereka’, dimana ‘kita’ adalah *lowest sector society* yang diperjuangkan dan ‘mereka’ adalah para elit politik yang dianggap tidak peduli dan bertanggungjawab terhadap masalah publik terutama masyarakat yang terksklusi. Identitas ini menjadi instrumen demokrasi yang membuat para aktor populis berjuang untuk meraih kesetaraan politik dengan memasuki ranah politik,

⁸Pribadi, Airlangga. 2013. “Menjernihkan Politik Populisme”. Majalah Indonesia 2014. Vol 1, No. 8. 2013. (online).

⁹Populisme, dalam pengertian umumnya adalah sebuah rezim yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang bukan rakyat, yakni kalangan oligarki. Secara umum, populisme sedang berkembang di Indonesia, yang di dalamnya ada lebih banyak kalangan yang bisa memberikan suaranya tanpa adanya tekanan politik lagi. Meskipun masih ada problem soal populisme, tetapi dari sudut pandang demokrasi dapat dilihat bahwa populisme memberi peluang bagi pemimpin kharismatik dan media untuk menjangkau langsung masyarakat umum, dan menawarkan skema kesejahteraan sebagai sebuah solusi. Ketika hari ini para petani, pekerja perkebunan, dan nelayan dan kaum miskin kota dihadapkan pada persoalan pengusuran, penebangan hutan, perumahan, dan infrastruktur fisik, populisme bisa menyelesaikan masalah ini. Di sisi lain, skema ini juga digunakan untuk menarik kelas menengah perkotaan yang dihadapkan pada persoalan korupsi, kemacetan lalu lintas, dan ide-ide soal desain pembangunan kota yang ramah lingkungan. (Pontoh 2012, Savirani, Tornquist, & Stoke, 2014)

dimana demokrasi sejatinya juga memberi mereka kesempatan untuk tidak lagi tereksklusikan dari politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Umum Sebagai Pintu Masuk Pemimpin Populis

Dalam perkembangannya, demokrasi saat ini memasuki tahap representasi politik yang tinggi. Pemilihan umum dianggap sebagai sarana partisipasi politik. Pemilihan umum atau demokrasi prosedural ini adalah pengejawantahan dari pengertian pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilu adalah lembaga sekaligus prosedur praktik politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*representative government*) yang menurut Robert Dahl merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern. Lev mendeskripsikan demokrasi sebagai '*virtuous conceit*' yang berarti bahwa demokrasi adalah sistem pemilihan representatif dengan aktualisasi dan potensi partisipasi yang derajatnya cukup tinggi (Kingsbury, 2007). Demokrasi kini tidak dapat secara harfiah hadir sebagai pemerintahan oleh rakyat, rakyat harus menunjuk wakil-wakilnya untuk mengelola negara. Nilai-nilai demokrasi yang mementingkan kepentingan rakyat tentu tidak dapat begitu saja dihilangkan dalam demokrasi kekinian. Pihak yang dipilih oleh masyarakat sebagai wakilnya harus benar-benar mampu menjadi wakil dan mendapat legitimasi dari masyarakat.

Schumpeter, dikutip oleh Kingsbury, mendefinisikan demokrasi sebagai kompetisi terbuka diantara seluruh pemimpin politik dimana peran masyarakat adalah mengalokasikan legitimasi kepada seseorang atau sekelompok orang yang akan menjadi penguasa (Kingsbury, 2007). Demokrasi sebagai sebuah model politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik dan kemampuan dalam memilih para pemimpin politik pada saat

pemilihan. Menurutnya, metode demokratis adalah penataan kelembagaan untuk sampai kepada keputusan politik di mana individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif untuk meraih suara. Demokrasi itu seperti 'pasar', satu mekanisme institusional untuk menyisihkan yang terlemah dan mendukung mereka yang paling kompeten dalam perjuangan kompetitif untuk suara dan kekuasaan (Held, 2007). Seperti lazimnya kontes atau kompetisi lain, dalam proses demokrasi peserta-peserta juga harus menyiapkan diri menjadi yang paling layak untuk menang. Dalam hal pemilihan umum ini, peserta pemilihan umum dituntut untuk menggunakan berbagai cara agar menjadi layak dipilih oleh masyarakat, atau paling tidak terlihat layak dipilih. Pada akhirnya pemilihan umum dimaknai sebagai proses demokrasi untuk menentukan aktor-aktor yang menduduki jabatan pemerintah yang nantinya berperan besar dalam penentuan arah pemerintahan. Pemilu sebagai salah satu mekanisme demokrasi menjadi elemen kunci dalam demokrasi itu sendiri. Tanpa kompetisi pemilu bebas, adil dan teratur, pemerintah tidak dapat diadakan benar-benar bertanggung jawab terhadap rakyat. Pemilu adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga Negara. Setidaknya ada empat fungsi pemilu yang terpenting: legitimasi politik, terciptanya perwakilan politik, sirkulasi elite politik, dan pendidikan politik¹⁰ (Hikam, 1999).

¹⁰Melalui pemilu, legitimasi pemerintah/penguasa dikukuhkan karena ia adalah hasil pilihan warga negara yang memiliki kedaulatan. Selanjutnya, melalui pemilu seleksi kepemimpinan dan perwakilan dapat dilakukan secara lebih *fair* karena keterlibatan warga negara. Praktek demokrasi modern, yaitu melalui perwakilan dapat dilakukan sepenuhnya di sini. Dengan pemilu pula maka akan terjadi pergantian elit kekuasaan secara lebih adil karena warga negaralah yang langsung menentukan siapa yang masih dianggap memenuhi syarat dan siapa yang tidak. Secara tidak langsung, ini berarti pula bahwa pemilu adalah alat kontrol warga negara kepada penguasa apakah yang terakhir itu masih dipercaya atau tidak. Akhirnya, pemilu adalah sebuah alat untuk melakukan pendidikan politik bagi warga negara agar mereka memahami hak dan kewajibannya. Dengan terlibat dalam proses pelaksanaan pemilu, diharapkan bahwa warga negara akan mendapatkan pengalaman langsung bagaimana selayaknya seorang warga negara berkiprah dalam sistem demokrasi.

Karenanya, pemilihan umum hingga saat ini adalah salah satu sistem yang paling representatif atas berjalannya proses demokrasi, hingga ada sebuah adagium bahwa “*tidak pernah ada demokrasi tanpa pemilihan umum*”. Namun demikian, makna pemilu sebagai sirkulasi elit justru menegaskan jawaban bahwa demokrasi sebenarnya kompatibel untuk menumbuhkembangkan elitisme.

Survey Demos (2009) menunjukkan aktor demokrasi atau aktor alternatif kini lebih aktif di arena politik dan cenderung untuk mengambil pilihan yang disebut ‘jalan pintas populis’ untuk menghindari representasi dengan memilih membangun hubungan ‘langsung’ antara para pemimpin masyarakat dengan para elit, di satu sisi dan masyarakat disisi lain. Pilihan untuk aktif di politik ini berarti terkait pula dengan membaiknya kapasitas para aktor alternatif sejalan dengan peralihan posisi dalam kaitannya dengan instrumen-instrumen demokrasi, seperti pemilu yang bebas dan adil, representasi yang baik, partisipasi langsung, dan partisipasi politik lainnya (Samadhi dan Warouw, 2009). Pemilu yang demokratis memberikan kesempatan bagi para pemimpin populis yang lahir dari sebuah ketegangan dan permintaan. Menempatkan pemilu sebagai alat demokrasi sama dengan memosisikan pemilu dalam fungsi aslinya sebagai jalan pembentuk pemerintahan yang representatif. Nilai demokratis sebuah pemilu dinilai dari tingkat kompetisi yang berjalan di dalamnya. Semakin kompetitif sebuah pemilu semakin demokratis pula pemilu tersebut. Hal itu guna menjawab bagaimana sistem demokrasi mengatasi ketegangan-ketegangan politik ini, antara politik eksklusif dan politik inklusif, sejauh ini telah melahirkan berbagai model kelembagaan dalam politik demokrasi. pada tatanan cara atau strategi tersendiri dengan kelebihan dan kelemahan masing-masing bagaimana mengatasi eksklusif

sosial dari bekerjanya logika kesetaraan, terutama seperti dijalankan melalui strategi *paratactical* dalam pembentukan kelembagaan politik demokrasi populist/popular (Laclau, 2005).

Sistem pemilihan umum yang dipakai oleh sebuah negara memiliki pengaruh yang signifikan terhadap eksistensi populisme itu sendiri. Seorang tokoh harus menentukan ia harus menjadi populer di kalangan mana agar memenangkan sebuah pemilihan. Hal tersebut baru dapat ditentukan ketika sudah dipastikan sistem pemilihan mana yang akan dipakai. Kesadaran pemimpin populis (baca: agensi) untuk berkompetisi melalui mekanisme pemilu diikuti dengan kesadaran membaca peta politik masyarakat yang jenuh dengan aktor-aktor utama dan elit-elit lama yang tidak membawa perubahan. Terutama dalam pemilihan pemimpin politik di tingkat eksekutif baik itu presiden, gubernur, bupati atau walikota, mudah untuk membedakan mana pemimpin populis yang merupakan aktor alternatif mana yang elit lama. Berbekal modal ‘*particular demand*’ pemimpin populis memenangkan pemilu dengan strategi yang sudah tentu berbeda dengan aktor utama lainnya yakni dengan kampanye-kampanye yang menjual nilai-nilai demokrasi dan orientasi pembangunan ‘atas nama rakyat’.

Kepemimpinan Populis yang Menggeser Elit Politik Lama : Sirkulasi Elit?

Ada dua kesulitan mendasar yang bisa dikonfrontasi mengenai sirkulasi Elit. Yang pertama, apakah sirkulasi elit itu mengacu pada proses dimana individu-individu berputar antara elit dan nonelite, atau yang kedua mengacu pada proses dimana elit satu digantikan dengan elit yang lain? Kelompok sosial baru dapat terbentuk dalam masyarakat sebagai akibat perubahan ekonomi atau kultural, bahwa kelompok itu kemudian bisa meningkatkan pengaruh sosial mereka sejauh ini dalam jenis-jenis aktivitas dimana mereka berada menjadi jenis-jenis aktivitas yang sangat vital untuk masyarakat luas, dan bahwa

Ia akan mengerti dan memahami posisinya sebagai pemegang kedaulatan yang sangat menentukan gerak serta perjalanan bangsa dan negaranya (Hikam, 1999).

aktivitas tersebut pada saatnya bisa membuat perubahan dalam sistem politik, dan struktur sosial secara keseluruhan (Bottomore, 2006).

Perubahan-perubahan dalam skala nasional maupun dalam skala global menyebabkan ledakan antisistem dengan karakter ; *pertama*, terdapat perasaan terasing dari penguasa dengan tanggapan yang berbeda-beda dan secara politis ambivalen; dan *kedua*, penolakan yang luas untuk menerima keputusan kelompok yang sedang memegang kekuasaan, baik yang dipilih secara demokratis atau tidak, karena elit penguasa sering dipandang berada di luar jangkauan perasaan aspirasi rakyat jelata yang seharusnya dibawa oleh demokrasi untuk menaikkan tingkat keterwakilan dan pengaruh kemasyarakatan (Haynes, 2000). Melihat hal tersebut, aktor demokrasi kini lebih aktif di berbagai arena politik dan cenderung mengambil pilihan yang disebut “jalan pintas populis” untuk menghadirkan representasi dengan memilih membangun hubungan ‘langsung’ antara para pemimpin masyarakat dengan para elit di satu sisi dan masyarakat disisi lain. Dengan memperhitungkan kapasitas politik para aktor alternatif, data Demos menunjukkan bahwa para aktor kerap memilih jalan pintas populis dalam sistem politik. Rakyat pada umumnya dimobilisasi ke dalam politik melalui cara-cara klijentalisme dan populisme (Samandhi dan Warouw, 2009).

Dalam pemilu, aktor populis diharuskan mengetahui kewajibannya sebagai kontestan untuk menaati aturan main yang ada. Cara-cara mobilisasi masa melalui popularitas dan identitas ‘anti-elit’ dan ‘anti-kemapanan’ mengantarkan aktor populis ini mampu merangsek dalam jajaran elit politik melalui mekanisme pemilu yang diakui oleh semua pihak sebagai satu-satunya jalan kekuasaan politik. Aktor populis juga cenderung memanfaatkan dukungan dari pemimpin-pemimpin informal kharismatik yang

didukung oleh sistem patronase¹¹. Ketika memenangkan kontes dan memegang pucuk kekuasaan, tokoh populis harus tetap sadar bahwa aktifitasnya tetap terikat dalam kerangka demokrasi apalagi ditambah dengan pelekatan identitas sebagai agensi. Pemimpin populis harus berpegang pada demokrasi sebagai “*the only game in town*”, karena satu-satunya ide dan gagasan yang bisa membuatnya bersaing dengan para elit baru juga sama-sama demokrasi. Meskipun demikian, aktor populis memiliki kelamahan dengan bersandar pada sumber daya - sumber daya sosial dan informasi serta ketidakmampuan yang disebabkan lemahnya kapasitas untuk mempertemukan banyak kepentingan organisasi-organisasi populer berbasis massa dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil, para aktor demokrasi sedang mendorong demokrasi ke bibir jurang (sama dengan krisis representasi) (Samadhi dan Warouw, 2009). Alih-alih sebagai jalan keluar mengatasi masalah representasi yang tidak terselesaikan oleh elit lama, kondisi ini justru menimbulkan masalah representasi baru karena kurangnya kemampuan deliberasi dari pemimpin populis. Pada akhirnya aktor populis yang berhasil mencapai kekuasaan politik memiliki jabatan elit politik yang terlegitimasi, belum sampai pada cita-cita demokrasi dan negara kesejahteraan.

Legitimasi kekuasaan akan menentukan seberapa lama suatu aktor akan bertahan dalam kekuasaannya atau justru terganti oleh kelompok orang lainnya yang disebut dengan sirkulasi elit. Adanya sirkulasi elit yang diisyaratkan oleh Pareto dan Mosca menunjukkan bahwa golongan elit nyatanya mengalami perkembangan yang disebabkan oleh proses sosial utama yakni, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan spesialisasi jabatan, pertumbuhan organisasi formal/birokrasi, dan perkembangan keragaman moral. Dengan berjalannya keempat proses itu,

¹¹ Samandhi, Willi Purna & Warouw, Nicholas. (2009). *Demokrasi di Atas Pasir*. Jakarta : PCD Press dan Demos. Hlm 167.

kaum elit pun menjadi semakin banyak dan semakin beraneka ragam dan bersifat lebih otonom (Keller, 1984 : 91), ditunjukkan dengan banyaknya kemunculan aktor alternatif yang sama juga bersifat populis. Sekali aktor populis yang sudah menjadi elit politik tidak menjalankan kekuasaannya untuk tujuan kesejahteraan, maka ia juga bisa disingkirkan oleh aktor populis lainnya yang sedang mengintai. Hal ini sebagai isyarat bahwa sirkulasi elit adalah suatu keniscayaan mengancam posisi siapapun entah sirkulasi antar elit maupun sirkulasi dari nonelit menjadi elit.

Sirkulasi elit tersebut memaksa para elit untuk berada dalam status quo atau *unity* agar keberadaan dan kepentingan mereka sama-sama terjaga. Mills mengemukakan untuk melihat *unity* dari kekuasaan elit kita harus memahami 3 hal penting, yakni (a) psikologi dari setiap elit yang terlibat, dimana hal ini menyangkut motivasi, kehidupan sosial, namun menentukan *style* dan posisi dari elit tersebut; (b) struktur dan mekanisme institusional yang secara hirarkis sudah dibangun, bagaimana koneksi diantara para elit tersebut; (c) bukan hanya sekedar psikologis dan struktur komando melainkan lebih dari kordinasi eksplisit diantara para elit (Mills, 1956). Konsensus ini yang kemudian melahirkan kebutuhan integrasi para elit yang dapat dilihat dari pola relasi yang mereka lakukan.

Pada akhirnya keberadaan elit bukanlah sesuatu yang solid dan pasti akan bertahan selamanya. Yang akan ada sepanjang masa adalah keberadaan entitas yang dinamakan elit yang merupakan minoritas yang unggul. Sementara aktor dari elit itu sendiri akan berubah sesuai dengan perubahan sosial atau disebut mengalami sirkulasi. Pareto mengatakan bahwa perputaran individu antara elit dan nonelit merupakan hal yang konstan dan fenomena yang reguler (Bottomore, 2006). Oleh karenanya jika aktor alternatif dengan tampilan populis ini hadir kemudian menggantikan aktor lama yang sebelumnya merupakan elit ternama bukanlah menjadi

soal baru. Artinya bahwa demokrasi secara tersirat menjadi wadah yang subur untuk meneguhkan ekisistensi elitisme melalui mekanisme sirkulasi elit, entah itu elit lama atau nonelit yang bertransformasi menjadi elit politik baru. Seperti disampaikan Burhanudin Muhtadi bahwa, ‘populisme adalah “cermin demokrasi,” untuk meminjam istilah Panizza (2005) agar elit tidak lupa menyerap sebesar-besar kepentingan rakyat dalam proses pembuatan kebijakan’¹². Pada intinya menegaskan bahwa dalam kehidupan masyarakat posisi menguasai dan dikuasi dalam politik pasti ada dan tidak terbantahkan, setidaknya inilah paradoks dari demokrasi.

Populisme : Antara Gagasan atau Cara Baru Meraih Kekuasaan Politik?

Demokrasi tidaklah lepas dari politik dan kekuasaan. Kekuasaan politik adalah kemampuan untuk meyakinkan, membujuk, memaksa, merubah, mempengaruhi, memodifikasi, atau memanipulasi tindakan, kepercayaan atau nilai yang dimiliki individu lain. Dapat dikatakan bahwa kekuasaan politik adalah tentang bagaimana mengubah atau memodifikasi arah tujuan. Semua kekuasaan adalah politis karena memiliki kecenderungan luas dan variatif dimana efeknya dapat dirasakan dan dilihat tapi tidak dapat disentuh karena bisa jadi dilakukan secara tidak langsung. Oleh karenanya terdapat perbedaan pandangan mengenai struktur kuasa, ada yang berpandangan bahwa kuasa politik hanya ada dan terdapat dalam struktur lembaga negara ada juga yang berpandangan bahwa kuasa ada dalam setiap lini kehidupan manusia. Argumen ini didasari bahwa kekuasaan itu seperti pedang bermata dua yang ada dimanapun selama disana ada kehidupan sosial manusia yang mana manusia diyakini sebagai makhluk hidup yang memiliki hasrat, motivasi dan

¹²Burhanudin Muhtadi, 2013. “Populisme; Madu Atau Racun Bagi Demokrasi?”. Majalah Indonesia 2014, No. 3, Vol. 1, 2013. Hal 94 (Online)

kebutuhan atas penghargaan. Bahwa kuasa bisa bersifat langsung maupun tidak langsung tergantung pada relasi kuasa yang dibentuk. Semakin besar level relasi kuasa yang dibentuk maka akan semakin besar pula pengaruh yang dihasilkan untuk membuat perubahan terhadap lingkungan atau konten yang diinginkan¹³.

Relasi kuasa ini adalah situasi yang dipengaruhi oleh banyak aspek dan berdampak pada aspek kehidupan lainnya. Selama ada interaksi antar individu, maka relasi kuasa akan bisa terjadi, lagi-lagi hal ini berkaitan dengan *human being* dan *human nature* bahwa sifat-sifat kuasa melekat dalam diri manusia. Yang membedakan kemudian adalah keberhasilan menguasai antara satu manusia dengan manusia lainnya. Bahwa manusia memiliki potensi kuasa adalah benar, namun apakah semua manusia berhasil menggunakan potensi kuasanya untuk dapat berkuasa adalah belum tentu. Hal ini bergantung pada seberapa besar manusia memahami potensi kuasanya, baik yang dari sisi manusia yang akan menguasai atau manusia yang akan dikuasai, jika masing-masing individu sadar akan potensi kuasanya maka kemungkinan akan terjadi resistensi, yang artinya “menguasai” akan mungkin tidak terjadi dan apabila resistensi dari individu lainnya kecil, maka “menguasai” besar kemungkinan terjadi.

Kekuasaan, menurut Foucault, melekat pada manusia dan milik masyarakat secara utuh bukan segelintir orang, sebagaimana dijelaskan Giddens,¹⁴ kekuasaan pada dasarnya adalah suatu kapasitas transformatif. Ia melekat secara inheren berdasarkan tindakan rutin. Kekuasaan diproduksi dan direproduksi oleh agen (aktor) sesuai dengan perkembangan situasi. Kapasitas

transformatif lebih berpeluang untuk berhasil manakala digalang oleh elit, dalam hal ini elit yang dimaksud adalah pemimpin yang populis (Haryanto, 2009). Sebagai aktor, pemimpin populis melihat peluang sekaligus tantangan yang diberikan oleh struktur dalam sistem politik yang baru (dari sistem otoritarian menjadi sistem demokratis) untuk dapat meraih atau kehilangan kekuasaannya. Tidak semua masyarakat kemudian menggunakan kekuasaan yang melekat dalam dirinya untuk melakukan perubahan sosial. Masyarakat yang menyadari potensi dan berupaya melakukan tindakan politik disebut dengan “aktor”¹⁵, yang dalam gagasan demokrasi ala Beetham, merupakan agensi yang membentuk keterwakilan populer, dan mengakar pada kekuatan populer ini. Jadi, dalam gagasan Beetham, “aktor” lebih dari sekedar “elit” atau “pemimpin” (Savirani, Tornquist, & Stoke, 2014). Oleh karenanya, aktor populis, membaca dari penafsiran PWD, jauh lebih unggul dibanding elit itu sendiri. Keunggulan aktor alternatif dibanding elit ini apakah diakui atau tidak. Yang jika diakui maka aktor populis akan membuat tafsir baru mengenai elit politik dan jika tidak diakui, maka aktor populis setara dengan elit itu sendiri.

Kalaulah memang aktor berbeda dengan elit, namun apa yang dilakukan aktor dalam upayanya masuk ke dalam institusi politik dan menggantikan posisi elit lama, teori elit akan membacanya sebagai sirkulasi elit. Dan oleh karenanya akan sangat membingungkan ketika dikatakan bahwa demokrasi dan elit bertentangan. Mungkinkah keduanya komplementer bukan substitusi sehingga populisme juga hanya sebagai antitesis dari fungsi elit yang tidak berjalan dengan semestinya dalam demokratisasi.

¹³Relasi kuasa dapat dilihat dalam bentuk kuasa yang pada intinya menunjukkan sesuatu antara yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi dan antara yang mendominasi dan didominasi, yakni : *leader – follower; superior – subordinate; monarch – subject; patron – client; master – slave; speaker – listener; interviewer – informant; enemy – friend* (Mills, 1956).

¹⁵ Secara konvensional aktor politik merujuk pada individu atau kelompok individu. Aktor dalam demokrasi sering disamakan dengan “elit”, atau “pemimpin”. Ada kalanya elit atau pemimpin memiliki akar massa yang kuat, tapi ada juga yang tidak, dan mereka bersifat mengambang, atau floating (Savirani, Tornquist, & Stoke, 2014)

Jika keunggulan aktor alternatif, menurut Beetham, dengan karakter populisme ini diakui, maka yang harus diapresiasi adalah kemunculan gagasan mengenai populisme, gagasan yang mengatasnamakan rakyat di atas segalanya untuk menuju negara kesejahteraan. Hal ini menunjukkan bahwa gagasan populisme sebenarnya bisa menjadi gagasan yang baik yang diyakini dan dimiliki oleh para aktor politik untuk menciptakan kehidupan demokrasi yang lebih mensejahterakan. Artinya gagasan populisme bukan hanya milik aktor alternatif, namun gagasan ini bisa saja mempengaruhi elit-elit lama. Sebenarnya populisme tidak pernah bermaksud mengubah atau mengganti sistem sosial kapitalisme dengan sistem non-kapitalis. Apa yang dilakukan rezim populis adalah menggeser orientasi kebijakan rezim sebelumnya, dari yang pro-oligarki menjadi pro-rakyat. Kemunculan populisme juga diringi oleh, dan tampaknya berujung pada, tampilnya sejumlah figur populer. Para figur populer lebih peduli pada upaya memperkuat basis kekuasaan dan popularitasnya, daripada membuka dan mengajak perdebatan tentang kebijakan (Pontoh 2012, Savirani, Tornquist, & Stoke 2014). Aktor alternatif justru mengambil jalan pintas untuk melakukan tekanan langsung terhadap lembaga-lembaga pengambil kebijakan untuk berpihak pada kebutuhan dan kepentingan rakyat (Samadhi dan Warouw, 2009).

Bencana politik akan timbul jika gagasan populisme ini kemudian diyakini lebih dari sekedar mencapai kesejahteraan dalam berdemokrasi, namun dimanfaatkan hanya sebatas mencapai kekuasaan politik baik oleh para aktor alternatif maupun oleh elit lama. Jika demikian yang terjadi maka populisme –disamping patronase dan klientelisme- menjadi tumpuan para aktor yang diharapkan bisa mencapai kekuasaan politik, entah itu aktor alternatif maupun elit lama. Ditambah aliansi ‘atas nama rakyat’ yang dibangun hanya bagian dari proses kuasa politik dari sang figur populis. Jika hal ini yang terjadi, maka sebenarnya

kehadiran aktor populis tidak menjawab permasalahan representasi. Dari ketidakmampuan aktor populis dalam mempertemukan banyak kepentingan, maka mereka sebenarnya sedang membawa demokrasi Indonesia menuju fase kemajuan semu atau malah stagnansi (dibaca: transisi permanen demokrasi) (Samadhi dan Warouw, 2009). Jangan sampai Indonesia kemudian terjerembab dalam fasisme model baru seperti negara-negara Amerika Latin yang mengandalkan figur populisme tanpa pemberdayaan politik *civil society*, sebagai principal dari demokrasi¹⁶.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Ketidakpuasan masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi mengakibatkan terjadinya ketegangan politik antara masyarakat dan pemerintah. Menurunnya rasa percaya masyarakat mempengaruhi tingkat apatisme masyarakat terhadap politik sementara disisi lain masyarakat merasa membutuhkan kehadiran pemerintah (melalui aktor-aktor representasi politik) untuk mewujudkan *welfare state*. Faktor inilah yang kemudian menumbuhkan populisme dan melahirkan pemimpin-pemimpin populis sebagai agensi yang diberi kesempatan berkompetisi menjadi pemimpin politik melalui mekanisme pemilu yang demokratis.

Kecenderungan lain yang mengiringi kemunculan populisme dalam bentuk politik yang kian terpusat pada figur. Walaupun memiliki perhatian yang sama dengan publik dalam hal isu-isu kesejahteraan, tergantung pada dukungan yang lebih luas, bekerja dengan partai politik dan kelompok kepentingan dan harus menyediakan program-program politik yang sesuai keinginan rakyat, para aktor dominan khususnya lebih peduli pada karier politiknya, sehingga tidak membedakan mereka dengan aktor sebelumnya yang akibatnya fenomena ini hanya dibaca sebagai sirkulasi elit dari elit

¹⁶Yahalah, Ishmael. (2014). *Venezuela Paska-Chavez : Prospek Kemandirian Perjuangan*. (Jurnal Kotinum Online)

lama ke nonelit. Karena kemunculan populisme diringi oleh, dan tampaknya berujung pada, tampilnya sejumlah figur populer. Para figur populer lebih peduli pada upaya memperkuat basis kekuasaan dan popularitasnya, daripada membuka dan mengajak perdebatan tentang kebijakan, yang bisa sangat menyulitkan untuk mewujudkan negara kesejahteraan yang demokratis.

Kebijakan yang populis tentu dapat menjaga *image* pemimpin tersebut dan mempertahankan popularitasnya sendiri, namun pemimpin populis akan menemui sebuah dilema ketika dihadapkan pada kondisi untuk memilih antara kualitas kebijakan atau popularitas kebijakan. Seperti kita ketahui, tidak semua kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang populer, begitu pun dengan kebijakan yang populer, tidak semua kebijakan populer itu merupakan kebijakan yang mempunyai kualitas paling baik untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dilema ini adalah ujian lain bagi ketahanan kepemimpinan pemimpin populis dengan gagasan populisme yang diusungnya. Jika pemimpin populis ini tidak mampu memenuhi janji pencapaian kesejahteraan maka ia sebenarnya sedang dibayangkan oleh aktor populis lainnya dan elit-elit lama yang terdepak dalam kekuasaan politik, untuk siap sedia disingkirkan, dengan alasan yang sama : ‘atas nama rakyat’ dan ‘untuk kesejahteraan’.

Bisa jadi klaim Burhanuddin Muhtadi bahwa populisme adalah politik yang mundur ke belakang tidaklah sepenuhnya benar. Populisme menyadarkan dan mengembalikan semangat para politisi untuk berorientasi pada rakyat, sekalipun ada yang memanipulasi perkembangan gagasan populisme untuk keuntungan pribadi, karena dampaknya adalah mempertahankan *status quo* politik oligarki. Oleh karenanya harus ada kajian kembali apakah benar elitisme merupakan musuh dari demokrasi? Atau tidak ada demokrasi tanpa elit? Karena pada kenyatannya demokrasi hanya dipimpin

oleh segelintir orang atas nama representasi bukan keseluruhan orang. Jangan sampai populisme dikatakan hanya sebatas cara elit berganti baju untuk tetap eksis dalam permainan dengan nuansa demokrasi dan populisme bisa menjadi kendaraan bagi aktor yang bukan asalnya bukan siapa-siapa menjadi bagian dari elit yang berkuasa. Fenomena ini penting untuk dikaji karena mempelajari kondisi kekinian akan mengantarkan kita untuk dapat memprediksi apa yang terjadi di masa mendatang, tentunya untuk tujuan masyarakat yang lebih baik mencapai negara demokrasi yang sejahtera, seperti diungkap oleh John Naisbitt, “*the most reliable way to forecast the future is to try understand the present*” (Alfian, 2009).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfian, M. Alfian. (2009). *Menjadi Pemimpin Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bottomore, T.B. (2006). *Elit dan Masyarakat (Terjemahan)*. Jakarta : Akbar Tandjung Institute.
- Giddens, Anthony. (2010). *Teori Strukturasi (Terjemahan)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Haryanto. 2005. *Kekuasaan Elit*. Yogyakarta : Program Pascasarjana (S2) PLOD Universitas Gajah Mada
- Haynes, Jeff. (2000). *Demokrasi dan Masyarakat Sipil Dunia Ketiga*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Held, David. (2007). *Models of Democracy*. Jakarta : Akbar Tandjung Institute.
- Hikam, Muhammad AS. 1999. *Politik Kewarganegaraan : Landasan Redemokrasi di Indonesia*. Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama.
- Keller, Suzanne. 1984. *Penguasa dan Kelompok Elit, Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern (terjemahan)*. Jakarta : CV. Rajawali.

- Kingsbury, Damien. (2007). *Political Development*. New York : Routledge.
- Kurniawan, Lutfi J. dan Puspitasari, Hesti. 2008. *Negara, Civil Society & Demokratisasi : Membangun Gerakan Sosial dan Solidaritas Sosial dalam Merebut Perubahan*. Malang : In-Trans Publishing.
- Laclau, Ernseto. (2005). *On Populist Reason*. London–New York : Verso.
- Mills, C. Wright. 1956. *The Power Elite*. New York City : Oxford University Press.
- Samadhi, Willy Purna dan Warouw, Nicholas. (2009). *Demokrasi di Atas Pasir*. Jakarta-Yogyakarta : PCD Press dan Demos.
- Stokke, Kristian and Tornquist, Olle. (2013). *Democratization in The Global South, The Improtance of Transfotmative Politics*. New York : Palgrave MacMillan.
- Jurnal/Makalah/Artikel/Laporan Penelitian**
- Deiwiks, Christa. (2009). *Populism*. (Online). (<http://democracy.livingreviews.org/index.php/lrd/article/viewFile/lrd-2009-3/11>, diakses 23 Desember 2014).
- Haryanto. (2009). *Elit Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 13, No. 3, November 2009, hal 131-148. (Available at : <http://jurnalsospol.fisipol.ugm.ac.id/index.php/jsp/article/view/70/61>)
- Muhtadi, Burhanudin. (2013). “*Populisme; Madu Atau Racun Bagi Demokrasi?*”. Majalah Indonesia 2014, No. 3, Vol. 1, 2013. Hal 94 (Online). (Available at : <http://www.indonesia-2014.com/majalah/1039/4-pengusaha-1-jenderal-calon-presiden>, diakses pada hari Rabu, 07 Januari 2015)
- Noam, Girdon and Bonikowski, Bart. (2013). *Varietis of Populism : Literature review and Research Agenda*. (Online) (http://scholar.harvard.edu/files/gidron_bonikowski_populismlitreview_2013.pdf, diakses 23 Desember 2014)
- Pontoh, Coen Husain. (2012). *Menghindari Jebakan Teknokrasi Berwajah Populis*. (Online) (<http://indoprogress.com/2012/11/menghindari-jebakan-teknokrasi-berwajah-populis/>, diakses 23 Desember 2014)
- Pribadi, Airlangga. (2013). “*Menjernihkan Politik Populisme*”. Majalah Indonesia 2014. Vol 1, No. 8. 2013. (online). (Available at: <http://www.indonesia-2014.com/sites/default/files/pdf/ina.2014-08-general-final.pdf>, diakses pada hari Rabu, 07 Januari 2015)
- Savirani, Amalinda, dkk. & Olle Tornquist dan Kristian Stoke. (2014). *Demokrasi di Indonesia: Antara Patronase dan Populisme*, Ringkasan Eksekutif Project Power, Welfare, and Democracy, Jogjakarta: Universitas Gadjah Mada & Oslo University.
- Trijono, Lambang. (2011). *Reaktualisasi Politik Demokrasi : Politik Agensi dan Revitalisasi Kelembagaan Demokrasi*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 15, No. 2, November 2011, hal 93-110.
- Yahalah, Ishmael. (2014). *Venezuela Paska-Chavez : Prospek Kemandirian Perjuangan*. (Jurnal Kontinum Online) (<http://kontinum.org/teks/analisa/venezuela-paska-chavez-prospek-kemandirian-perjuangan/>, diakses 23 Desember 2014)
- Sumber Berita Eltronik dan Website**
- Generasi Pembaharu Politik. <http://graphics.wsj.com/lists/INDO>

GEN_INA, diakses 26 Desember 2014.

Wajah Baru Pemimpin Indonesia.
<http://indo.wsj.com/posts/2013/10/08/wajah-baru-pemimpin-indonesia/>,
diakses 26 Desember 2014.